

# **RENCANA KERJA TAHUN 2018**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT  
2017**

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaannirrohiim,*

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkat dan rahmatNya lah penyusunan Rencana Kerja 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2017 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2017 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2017, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Tahun 2017 belumlah sempurna. Saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan Rencana Kerja Tahun 2017 ini.

Bandung, Mei 2017  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jawa Barat

DR.H. ABAS BASARI, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580405 198206 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra OPD	11
Hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2014	12
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra KPID s/d tahun 2015 (Tahun berjalan)	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	30
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	34
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	35
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	38
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	40
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi	40
a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	40
b. Telaahan terhadap kebijakan Provinsi	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	44
3.3. Program dan Kegiatan	46
BAB IV : PENUTUP	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun

Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebagai berikut :

#### ***1.3.1 Maksud***

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2018.

#### ***1.3.2 Tujuan***

Tujuan dari penyusunan Renja 2018, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa; Dan
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2016 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Evaluasi pelaksanaan renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra tahun 2015 belum dapat dilakukan karena sebagai Perangkat Daerah Disdukcapil Provinsi Jawa Barat baru terbentuk pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 20 kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2016 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017.



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Bahan Penyusunan DP4 terdiri dari : 1. Data Bersih, 2. Data Anomali, 3. Data Ganda Tingkat Provinsi	100%	NA	NA	NA	NA	95%	95%	0.95%	Disdukcapi
	Pengelolaan Data Center Kependudukan	3 Unit Server yang terpelihara	3 Unit	NA	NA	NA	NA	3 Unit	3 Unit	100%	Disdukcapi
	Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Penyelesaian Masalah PIAK & Pemanfaatan Data, Bimbingan Teknis untuk 1. Admin Database, 2. Admin Aplikasi SIAK, 3. Perangkat Keras & Jaringan Komunikasi Data 4. Laporan studi komparasi	162 Orang	NA	NA	NA	NA	81 Orang	81 Orang	50%	Disdukcapi
	Penyusunan dan Pencetakan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusun dan tercetaknya Buku Agregat Per Semester,	400 Buku	NA	NA	NA	NA	200 Buku	200 Buku	50%	Disdukcapi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Buku Profil dan eBook									
	Pengembangan Jaringan Komunikasi Data SIAK Skala Provinsi	Tersambungnya Jaringan di 28 titik VPN selama 12 Bulan	28 Titik VPN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disudkcapil
	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Laporan Triwulanan Pengelolaan SIAK di Jawa Barat	4 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disudkcapil
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	PKS, Adovakasi PKS Kab/Kota, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	10 PD	NA	NA	NA	NA	4	4	40%	Disudkcapil
	Pengembangan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang terintegrasi, 2. Jasa Konsultan	2 kali	NA	NA	NA	NA	NA	1	50%	Disudkcapil
	Akselerasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak 0-18 Tahun	tercapainya penyelesaian dokumen akta pencatatan sipil bagi anak yatim	2.100 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disudkcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Tercapainya penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik di Kab/Kota se Jabar	27 Kab/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan	Pergub, SK Kadis dan Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran terkait Administrasi Kependudukan	4 Kali	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapi
	Penyusunan Kebijakan Provinsi Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pergub, SK Kadis dan Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran terkait Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1	1	25%	Disdukcapi
	Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Administrasi	Terselenggaranya Penilaian Pelayanan	8 Kali	NA	NA	NA	NA	4	4	50%	Disdukcapi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kinerja Dinas Dukcapil dan Rekomendasi Pelaksanaan Kerja									
	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR	Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah daerah									
	Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Tersedianya Jasa Penceramah, Pengajar Senam dan Pelatih, Sewa Lapangan Olahraga, Pakaian Dinas, Korpri, Olahraga dan pakaian adat	24 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	50%	Disdukcapil
	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Diklat dan Kursus	2 Tahun	NA	NA	NA	NA	1	1	50%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12	
		Singkat (Diklat dan Outbond)										
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
		Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Tersedianya ATK, Cetak, Fotocopy dan Penggandaan, Cinderamata	24 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	50%	Disdukcapil
		Penyediaan Langgan Kantor	Terselenggaranya Langgan Internet, Surat Kabar dan TV Berbayar, Langgan Tanaman dan Pewangi Ruang	24 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	50%	Disdukcapil
		Penyediaan Jasa Kantor, Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Tersedianya jasa kantor, Sewa, Publikasi, Dokumentasi dan Tenaga Non PNS	24 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	50%	Disdukcapil



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, Tamu, Lembur dan Air Galon Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	24 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	50%	Disdukcapil
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
	Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	Terselenggaranya Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil
	Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	Terselenggaranya Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil
	Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan Pembuatan Galeri Dukcapil	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Pembuatan Galeri Dukcapil									
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Terbanggunnya TPT antara lahan kantor dan pemukiman warga	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	Disdukcapil
	Pengadaan Mebeulair Kantor	Tersedianya Meja Kerja,Kursi Kerja, Meja Rapat, kursi rapat, sofa tamu, lemari	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	1	1	50%	Disdukcapil
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Visualisasi Data Kependudukan	Tersedianya Komputer, Printer, Laptop, AC, Motion Grafik Video, Aplikasi Bussiness Intelegence (Kependudukan), peralatan KTP-el (rekam-cetak), TV Flat	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	1	1	50%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Pengadaan Data Center Kependudukan	Tersedianya Server Storage (Blade), Upgrade Storage Server	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	1	1	50%	Disdukcapi
	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
	Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Terpenuhinya Jasa Telepon, Listrik dan Air, Alat Listrik dan Elektronik, Pengisian Tabung Gas dan Galon	24 bln	NA	NA	NA	NA	12 bln	12 bln	50%	Disdukcapi
	Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Jaringan dan Pemeliharaan Alat	24 bln	NA	NA	NA	NA	12 bln	12 bln	50%	Disdukcapi



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2017 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2017 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal dan Laporan Capaian Kinerja Internal	Dokumen Perencanaan Internal, RKA/DPA Murni dan Perubahan, Renstra dan IKU, Renja dan RKT, LAKIP, LPPD, Laporan Bulanan dan Triwulan	40 Dokumen	NA	NA	NA	NA	20	20	50%	Disdukcapi
	Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester, Rapat Kerja	20 Dokumen	NA	NA	NA	NA	10	10	50%	Disdukcapi
	Forum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Usulan Kegiatan	2 Kali	NA	NA	NA	NA	1	1	50%	Disdukcapi

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD**

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2017 (n-1) hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.2. Sedangkan untuk tahun n-2 (2016) tidak terdapat data pencapaian , karena terbentuknya Disdukcapil Provinsi baru pada tahun 2017.

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)
2. Akurasi data kependudukan di Jawa Barat yang masih harus ditingkatkan. masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.

3. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah.
4. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri
5. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
6. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah
7. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah;
8. Sarana dan Prasarana kerja yang terbatas.

**Tabel T-II.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016 (n-2)	Tahun 2017 (n-1)	Tahun 2018 (n)	Tahun 2019 (n+1)	Tahun 2016 (n-2)	Tahun 2017 (n- 1)	Tahun 2018 (n)	Tahun 2019 (n+1)	
	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat				N/A	95%	100%	N/A	N/A	Belum tersedia	100%	N/A	
	Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat				N/A	98%	100%	N/A	N/A	Belum tersedia	100%	N/A	
	Pemanfaatan Data Kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat				N/A	4 PD	23 PD	N/A	N/A	Belum tersedia	23 PD	N/A	



## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

**Tabel. T-II.3.**

### Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Nama OPD : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
1	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Jawa Barat	Bahan Penyusunan DP4 terdiri dari : 1. Data Bersih, 2. Data Anomali, 3. Data Ganda Tingkat Provinsi	100%	265.000.000	Peningkatan pemahaman literasi media penyiaran	Jawa Barat	Terlaksananya Peningkatan pemahaman literasi media penyiaran	4 kali	265.000.000	
2	Pengelolaan Data Center Kependudukan	Jawa Barat	3 Unit Server yang terpelihara	3 Unit	100.000.000	Diseminasi informasi melalui media	Jawa Barat	Terlaksananya diseminasi informasi melalui media	4 talkshow TV dan 25 Radio di 25 Kab/Kota & ILM 750 spot)	500.000.000	Talkshow dan ILM yang menjangkau 25 kab/kota di Jawa Barat
3	Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jawa Barat	Penyelesaian Masalah PIAK &	81 Orang	183.717.000	Gerakan masyarakat Jawa Barat peduli media	Jawa Barat	Terlaksananya Gerakan masyarakat Jawa Barat	4 kali	183.717.000	

	Kependudukan (PIAK)		Pemanfaatan Data, Bimbingan Teknis untuk 1. Admin Database, 2. Admin Aplikasi SIAK, 3. Perangkat Keras & Jaringan Komunikasi Data 4. Laporan studi komparasi			sehat & pemirsa cerdas (Gemas Pedas)		peduli media sehat & pemirsa cerdas (Gemas Pedas)			
4	Penyusunan dan Pencetakan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan	Bandung	Tersusun dan tercetaknya Buku Agregat Per Semester, Buku Profil dan eBook	400 Buku	350.000.000	Penganugerahan DISDUKCA PIL award	Bandung	Terlaksananya Penganugerahan DISDUKCA PIL award	1 kali	350.000.000	
5	Pengembangan Jaringan Komunikasi Data SIAK Skala Provinsi	Jawa Barat	Tersambungnya Jaringan di 28 titik VPN selama 12 Bulan	28 Titik VPN	215.000.000	Pengawasan dan penertiban lembaga penyiaran	Jawa Barat	Terlaksananya Pengawasan dan penertiban lembaga penyiaran	4 wilayah	430.000.000	Peningkatan wilayah cakupan dan frekuensi penertiban dan pengawasan
6	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jawa Barat	Laporan Triwulanan Pengelolaan SIAK di Jawa Barat	4 Laporan	160.000.000	Workshop lembaga penyiaran	Jawa Barat	Terlaksananya Workshop lembaga penyiaran	5 kali	160.000.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		PKS, Adovakasi PKS Kab/Kota, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	10 PD							
	Pengembangan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan		1. Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan yang terintegrasi, 2. Jasa Konsultan	2 kali							
	Akselerasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akte		tercapainya penyelesaian dokumen	2.100 Dokumen							



	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERA AN APARATUR		Meningkat nya jaminan kesejahter aan bagi aparatur pemerinta h daerah								
	Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur		Tersediany a Jasa Pencerama h, Pengajar Senam dan Pelatih, Sewa Lapangan Olahraga, Pakaian Dinas, Korpri, Olahraga dan pakaian adat	12 bln							
	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur		Terseleng aranya Bimbingan Teknis, Diklat dan Kursus Singkat (Diklat dan Outbond)	1 Tahu n							
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
	Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor		Tersediany a ATK, Cetak, Fotocopy dan Pengganda an, Cinderama ta	12 Bln							
	Penyediaan Langganan Kantor		Terseleng aranya Langganan Internet, Surat Kabar dan TV Berbayar, Langganan Tanaman dan	12 Bln							

			Pewangi Ruang								
	Penyediaan Jasa Kantor, Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor		Tersedia nya jasa kantor, Sewa, Publikasi, Dokumentasi dan Tenaga Non PNS	12 Bln							
	Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor		Tersedia nya Makanan dan Minum Rapat, Tamu, Lembur dan Air Galon Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	12 Bln							
IV	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
10	Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	Bandung	Terselenggara nya Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK	1 kegiatan	250.000.000	Rehabilitasi Kantor DISDUKCA PIL Jawa Barat	Bandung	Tersedia nya sarana dan oprasana yang memadai	1 kegiatan	250.000.000	
11	Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	Bandung	Terselenggara nya Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama	1 kegiatan	120.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana DISDUKCA PIL Jawa Barat	Bandung	Terpenuhi nya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DISDUKCA PIL Jawa Barat	1 kegiatan	2.140.000.000	Pengadaan alat pemantau TV, radio dan layanan sms pengaduan dan pengadaan kendaraan operasional
	Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan Pembuatan Galeri Dukcapil		Terselenggara nya Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan Pembuatan Galeri Dukcapil	1 kegiatan							
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah		Terbangun nya TPT antara	1 kegiatan							

			lahan kantor dan pemukiman warga								
	Pengadaan Mebeulair Kantor		Tersedianya Meja Kerja, Kursi Kerja, Meja Rapat, kursi rapat, sofa tamu, lemari	2 kegiatan							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Visualisasi Data Kependudukan		Tersedianya Komputer, Printer, Laptop, AC, Motion Grafik Video, Aplikasi Bussiness Intelegence (Kependudukan), peralatan KTP-el (rekam-cetak), TV Flat	2 kegiatan							
V	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran DISDUKCAPIL Provinsi Jawa Barat	Bandung	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor DISDUKCAPIL Jawa Barat	12	530.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran DISDUKCAPIL Provinsi Jawa Barat	Bandung	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor DISDUKCAPIL Jawa Barat	12 Bln	630.000.000	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan jaringan, SMS pengaduan dan website oleh pihak ketiga.
VI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN										
13	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal DISDUKCAPIL Provinsi Jawa Barat	Bandung	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	12	90.000.000	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal DISDUKCAPIL Provinsi Jawa Barat	Bandung	Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	12 Bln	90.000.000	
Jumlah					5.200.000.000					8.085.000.000	

## 2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2016, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya.

**Tabel. T-II.4**

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-	-	-	-	

# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 16 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISDUKCAPIL**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan



merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2018 sebanyak 6 Program dan 33 Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- f. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 33 kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data) Rp. 550.000.000
2. Pengelolaan Data Center Kependudukan Rp. 200.000.000,-
3. Pembinaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Rp. 200.000.000,-
4. Penyusunan dan Pencetakan Data Agregat dan Profil Perkembangan Kependudukan Rp. 200.000.000,-
5. Pengembangan Jaringan Komunikasi Data SIAK Skala Provinsi Rp. 250.000.000,-
6. Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data Rp. 250.000.000,-
7. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Rp. 200.000.000,-
8. Pengembangan Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan Rp. 100.000.000,-
9. Akselerasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Anak 0-18 Tahun Rp. 300.000.000,-
10. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik Rp. 400.000.000,-
11. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan Rp. 100.000.000,-
12. Penyusunan Kebijakan Provinsi Tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 100.000.000,-

13. Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp. 200.000.000,-
14. Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Rp. 200.000.000,-
15. Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Rp. 100.000.000,-
16. Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Rp. 250.000.000,-
17. Penyediaan Langganan Kantor Rp. 200.000.000,-
18. Penyediaan Jasa Kantor, Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Rp. 350.000.000,-
19. Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Rp. 700.000.000,-
20. Rehabilitasi Gedung Bidang FPAK Rp. 230.000.000,-
21. Rehabilitasi Lobby Sekretariat dan Ruang Rapat Utama Rp. 230.000.000,-
22. Rehabilitasi Ruang Dharma Wanita dan Pembuatan Galeri Dukcapil Rp. 200.000.000,-
23. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rp. 200.000.000,-
24. Pengadaan Mebeulair Kantor Rp. 220.000.000,-
25. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Visualisasi Data Kependudukan Rp. 500.000.000,-
26. Pengadaan Data Center Kependudukan Rp. 200.000.000,-
27. Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Rp. 300.000.000,-
28. Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Rp. 300.000.000,-
29. Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Rp. 270.000.000,-
30. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta kelengkapannya Rp. 600.000.000,-
31. Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal dan Laporan Capaian Kinerja Internal Rp. 200.000.000,-
32. Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 150.000.000,-
33. Forum Perangkat Daerah Rp. 150.000.000,-

Jumlah Belanja Langsung untuk Tahun 2018 berdasarkan pagu indikatif Rp. 8.600.000.000,-  
(Delapan milyar enam ratus juta rupiah).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2018 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2018.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2018 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2018 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu: **”Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”**.